

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pentingnya *locus of control*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Kejadian yang terjadi di Indonesia sejak adanya UU No.33 Tahun 2004 memuat tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah membuat berlakunya pelaksanaan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengurus urusan daerahnya sendiri. Kinerja pemerintah daerah tidak hanya seputar menerima pendapatan dari dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat lewat adanya otonomi daerah, tetapi melibatkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan disusun dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang relevan terkait dengan posisi keuangan dan transaksi-transaksi dalam suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan (Aditya & Surjono, 2017).

Pelayanan publik menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya transfer kewenangan

tentunya diikuti dengan transfer sumber pendapatan bagi daerah (*money follow function*). Konsep transfer sumber pendapatan mengharuskan pengalokasian anggaran sesuai dengan fungsi pemerintahan. Penggunaan anggaran tentunya diperhatikan karena beberapa alasan: pertama, tidak terjadinya tumpang tindih fungsi. Kedua, efisiensi anggaran. Ketiga, tujuan tercapai sesuai target. Keempat, kinerja masing-masing unit berjalan optimal). Perhatian diberikan kepada lembaga pemerintahan ataupun organisasi publik lainnya seperti puskesmas, universitas, hingga satuan kerja pemerintah daerah (Kemenkeu, 2007).

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik. Alokasi dana (anggaran) diberikan kepada SKPD dengan tujuan agar tugas dan fungsinya bisa berjalan dengan baik yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Selaku entitas akuntansi para SKPD diharuskan untuk bisa menyusun laporan keuangan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah. Namun, masih banyak SKPD yang masih belum memperhatikan kualitas laporan keuangannya. Padahal laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan proses akuntansi dalam unit atau organisasi tersebut berjalan dengan baik (Ridzal *et al.*, 2022).

Laporan keuangan harus disusun secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah apakah telah sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan dengan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai sektor publik yang aktivitasnya

berhubungan dengan pelayanan publik harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan kualitas laporan keuangan yang baik. Dalam laporan keuangan nantinya akan ditunjukkan berapa realisasi yang telah digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal mengurus daerahnya sendiri (Yaqin & Jatmiko, 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) akan dinilai kualitasnya dengan pemberian opini yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) setiap tahunnya. Opini yang diberikan oleh BPK terbagi menjadi empat: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, opini WTP diberikan apabila memiliki sistem pengendalian internal yang baik, pada pos- pos laporan keuangan tidak ada salah saji yang cukup material serta laporan keuangan disusun secara wajar berdasarkan Sistem akuntansi pemerintahan.

Opini WDP diberikan apabila memiliki sistem pengendalian, tetapi terdapat beberapa salah saji yang material dalam laporan keuangan. Opini TW diberikan apabila sistem pengendalian internal tidak memadai dan ditemukan banyak salah saji dalam pos-pos laporan keuangan serta laporan keuangan disajikan secara tidak wajar sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Opini TMP, auditor tidak menyatakan pendapat dikarenakan lingkungan audit tidak cukup untuk membuat suatu opini (UU No.15 Tahun 2004).

Kejadian banyak dijumpai dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah yang masih belum menyajikan data sesuai peraturan dan banyak penyimpangan yang ditemukan oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 menunjukkan dari 541 LKPD yang telah diperiksa oleh BPK, sebanyak 41 LKPD memperoleh opini selain WTP, terdiri dari 38 WDP dan 3 TMP. LKPD yang masih belum memperoleh opini WTP dikarenakan terdapat permasalahan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain pemberian opini, BPK mengungkapkan 6.965 temuan dari 541 LKPD yang terdiri atas 5.366 permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.544 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari permasalahan SPI sebanyak 5.366, terdiri atas permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, permasalahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Selain permasalahan pada SPI, terdapat 6.544 hasil permasalahan ketidakpatuhan perundang-undangan yang dapat menyebabkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan sebesar Rp.2,35 triliun serta penyimpangan administrasi sebesar 2.020 permasalahan (BPK RI, 2022).

Tabel 1.1
Kelompok Temuan SPI

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.637
2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.791
3.	kelemahan struktur pengendalian intern	938
Jumlah		5.366

Sumber: <https://www.bpk.go.id/ihrs>

Pemerintah daerah membuat laporan keuangan sebaik mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban dikarenakan pemerintah yang akan mengendalikan serta menguasai sumber-sumber dan berdampak luas pada masyarakat seperti terwujudnya *Sustainable development goals* (SDGs).

Sustainable development goals (SDGs) adalah perjanjian internasional yang memiliki tujuan dalam hal pembangunan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut meliputi 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa kemiskinan, (2) Tanpa kelaparan, (3) Kehidupan sehat dan sejahtera, (4) Pendidikan berkualitas, (5) Kesenjangan gender, (6) Air bersih dan sanitasi layak, (7) Energi bersih dan terjangkau, (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur,

(10) Berkurangnya kesenjangan, (11) Kota dan Permukiman yang berkelanjutan, (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) Penanganan perubahan iklim, (14) Ekosistem lautan, (15) Ekosistem daratan, (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh, (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (Bappenas, 2021).

Laporan keuangan pemerintah merupakan produk dari akuntansi keuangan pemerintah. Informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah tentunya melewati proses yang tidak sederhana. Proses yang dilakukan pertama yaitu proses penyediaan input akuntansi yang baik dan benar. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencatatan, hingga proses terakhir yaitu membentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan keseluruhan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya baik melakukan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kinerja yang baik dari SDM (Sumber Daya Manusia) sangatlah diperlukan dalam mengelola laporan keuangan. Terdapat dua faktor yang memengaruhi kinerja bagi karyawan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pegawai seperti *locus of control*. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pegawai seperti kepemimpinan, keselamatan, budaya organisasi, dan motivasi yang diberikan pemimpin (Sri Wahyuni *et al*, 2016).

Pegawai pemerintahan yang bekerja di sektor publik membutuhkan suatu motivasi yang menjadi bagian dari *locus of control*. Motivasi yang dibangun dari dalam diri seorang pegawai nantinya akan memberikan efek positif berupa tanggung jawab atas tugas yang diberikan terutama dalam hal membuat laporan keuangan yang berkualitas. Keyakinan dalam menyelesaikan amanat dengan baik yang diberikan oleh pemimpin bisa menjadi dorongan dalam diri seorang pegawai. Keterampilan, kemampuan, dan usaha akan menjadi indikator penting dalam tercapainya *locus of control* (Wahyuni & Gorda, 2019)

Hasil penelitian oleh (Sudiarti & Juliarsa., 2020; Kurniawan *et al.*, 2017) menunjukkan bahwa *locus of control* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan diikuti menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal itu dikarenakan dalam diri seorang pegawai memiliki faktor disposisional (faktor internal dan faktor eskternal). Faktor internal mengacu pada kemampuan para pegawai untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dan didukung oleh faktor eksternal yang berasal dari pemberian motivasi oleh pemimpin.

Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan yang mematuhi standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dalam menyusun dan melaporkan keuangan pemerintah. Kualitas yang dimiliki oleh laporan keuangan pemerintah daerah bergantung pada penerapan standar akuntansinya

apakah telah sesuai dengan prinsip yang berlaku atau tidak. Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia pada saat ini menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, dimana transaksi ekonomi diakui, dicatat, dan dilaporkan pada saat transaksi terjadi bukan lagi pada saat penerimaan kas seperti sistem pemerintahan pada saat pra reformasi yang menggunakan basis kas (Pujanira & Taman, 2017). Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan agar menghasilkan laporan keuangan yang baik seperti pengembangan sistem pembukuan berganda (*double entry*) yaitu setiap transaksi akan dicatat pada sisi debit dan kredit. Penggunaan basis akrual (*accrual basis*) juga menjadi pengembangan dari laporan keuangan pemerintahan sehingga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian di masa depan juga dicatat.

Hasil penelitian oleh (Yaqin & Jatmiko, 2018; Pujanira & Taman, 2017) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya apabila standar akuntansi pemerintahan diikuti dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemerintah perlu menerapkan standar akuntansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan tujuan umum sehingga dapat meningkatkan keterbandingan anggaran per periode. Perbandingan tersebut nantinya akan menjadi penilaian dari masyarakat.

Kualitas laporan keuangan juga didukung dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa SPIP memiliki tujuan dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Kemudian SPIP juga dapat mewujudkan keandalan dalam laporan keuangan pemerintah. Aset negara dapat diamankan dengan sistem pengendalian intern dengan cara menerapkan kelima unsur dari sistem pengendalian intern yaitu: (1) Lingkungan pengendalian, (2) Penilaian risiko, (3) Kegiatan pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, (5) Pemantauan pengendalian intern. Tujuan dari SPIP yang terakhir adalah untuk menaati ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Hasil penelitian oleh Trisnawati & Wiratraja (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, artinya jika pemerintah tersebut menerapkan SPI dengan baik maka, akan menghasilkan kualitas laporan yang baik. Pemerintah yang menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik, maka semua aktivitas operasi, dan data akan berada di bawah kendali sehingga tujuan akan tercapai, risiko menjadi lebih kecil, dan informasi yang diberikan menjadi berkualitas. Hasil penelitian ini bertolak

dengan penelitian Shinta Philadhelphia *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemilihan SKPD Kabupaten Sampang sebagai objek penelitian karena Kabupaten Sampang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2021. Predikat WTP ini dapat diartikan bahwa pengelolaan dan aset telah dijalankan dengan benar sesuai dengan aturan dengan benar sehingga pemerintah yang bersih dan transparan dapat terwujud.

Gambar 1.1
Grafik Opini LKPD Kabupaten Sampang



Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-sampang/>

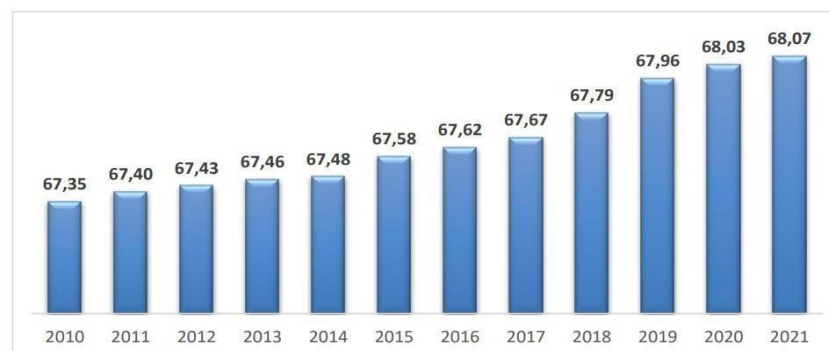
Penelitian mengenai pengaruh locus of control, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan sudah banyak dilakukan. Penelitian ini akan

menguji kembali apakah hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli berjalan dengan baik serta tujuan SDGs dapat terlaksanakan.

Terdapat beberapa indikatorSDGs yang telah terlihat dari pengaruh perkembangan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sampang yang semakin membaik yaitu pada indikator kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, dan berkurangnya kesenjangan. Umur harapan hidup saat lahir akan mempresentasikan umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ketahun. Selama periode 2018 hingga 2021 Kabupaten Sampang telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 67,79 tahun (2018) menjadi 68.07 tahun (2021). Hal ini menunjukkan adanya derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Sampang semakin membaik.

Gambar 1.2

Grafik Umur Harapan Hidup Saat Lahir Kab. Sampang



Sumber: <https://sampangkab.bps.go.id/>

Indikator SDGs selanjutnya pada pendidikan berkualitas selama periode 2018 hingga 2021, harapan lama sekolah Kabupaten Sampang meningkat dari 11,76 tahun (2018) menjadi 12,38 (2021). Pertumbuhan yang semakin meningkat akan menjadi modal untuk terwujudnya pembangunan SDGs di Kabupaten Sampang. Kualitas sumber daya manusia dari sisi Pendidikan yang semakin membaik akan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

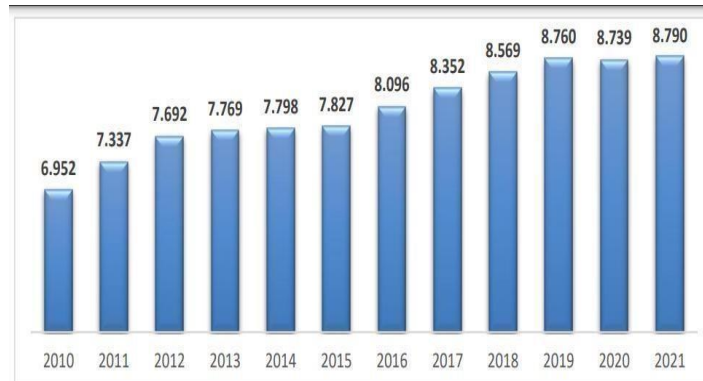
Gambar 1.3
Grafik HLS dan RLS Kab. Sampang



Sumber: <https://sampangkab.bps.go.id/>

Standar hidup layak dapat mewakili indikator SDGs yang lain yaitu kesenjangan sosial. Standar hidup layak dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sampang mencapai 8,79 juta/tahun meningkat daripada tahun 2018 sebesar 8,569 juta/tahun bahkan ditahun 2021 peningkatan per kapita terjadi setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 8,739 juta/tahun akibat pandemi *Covid-19*.

Gambar 1.4
Grafik Pengeluaran Per Kapita Kab. Sampang



Sumber: <https://sampangkab.bps.go.id/>

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Locus of Control*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Sampang)”** dengan harapan agar bisa mengetahui lebih lanjut tentang kualitas laporan keuangan yang ada pada Kabupaten Sampang serta dapat menambah wawasan kepada penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang?

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi para SKPD Kabupaten Sampang

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, memebrikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia khususnya Kabupaten Sampang, serta memberikan wawasan kepada para Satuan Unit Kerja Pemerintahan (SKPD) Kabupaten Sampang sehingga

mampu mengembangkan *locus of control*, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal dengan baik.

b. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi serta bahan pertimbangan untuk mengetahui arti pentingnya *locus of control*, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal.

2. Kegunaan secara teoretis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan terkait *locus of control*, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kabupaten Sampang.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut terkait pengaruh *locus of control*, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai dasar referensi dan perbandingan untuk menyusun penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. I Putu Wikan Maha Kurniawan *et al* (2017)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, dan *Locus Of Control* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Buleleng Barat”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, teknologi informasi dan *locus of control*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan *locus of control* terhadap kualitas laporan keuangan pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan.

terhadap kualitas laporan keuangan, serta *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Putriasri Pujanira&sAbdullah Taman (2017)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DIY.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Ni Nyoman Trisnawati&Dewa Nyoman Wiratraja (2018)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Addinul Yaqin&Bambang Jatmiko (2018)

Penelitian ini berjudul “Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD Kabupaten Biak Numfor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Nining Asniar Rizal *et al* (2022)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, serta sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Persamaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel dependen yang sama dengan penelitian Kurniawan *et al* (2017); Pujanira & Taman (2017); Trisnawati & Wiratmaja (2018); Yaqin & Jatmiko (2018); dan Ridzal *et al* (2022). Selanjutnya untuk perbedaan penelitian terdahulu terletak pada subjek. Kurniawan *et al* (2017)

menggunakan subjek penelitian Lembaga Pengkreditas Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng Barat. Putriasri Pujanira&Abdullah Taman (2017) menggunakan subjek penelitian pegawai di bagian keuangan Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Trisnawati & Wiratmaja (2018) menggunakan subjek penelitian OPD Kabupaten Gianyar. Yaqin&Jatmiko (2018) menggunakan subjek SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Biak Numfor. Ridzal et al (2022) menggunakan subjek penelitian pegawai yang bekerja pada dinas di Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Sampang.

Perbedaan berikutnya pada penelitian Pujanira & Taman (2017); Trisnawati & Wiratmaja (2018); Yaqin&Jatmiko (2018); dan Ridzal et al (2022) menggunakan software SPSS sedangkan pada penelitian ini menggunakan WarpPLS 7.0.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Stewardship Theory

Teori stewardship menurut Donaldson&Davis (1991) adalah teori yang menggambarkan situasi manajer atau pegawai termotivasi oleh tujuan untuk kepentingan organisasi bukanlah kepentingan individu (Yaqin & Jatmiko, 2018). Kehati-hatian dalam pengelolaan dan

pengalokasian sumber daya menjadi tanggung jawab pegawai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Siwambudi et al., 2017). Sifat manusia yang jujur serta mempunyai integritas yang tinggi bisa menjadi dasar dalam membangun teori stewardship (Ikriyati & Aprila, 2019).

2.2.2 Locus of Control

Locus of control adalah indikator dalam mengevaluasi diri individu yang merasa bahwa mereka kurang memiliki kontrol atas hidup dan kurang percaya diri (Sitorus, dkk., 2019 dalam Ni Luh Putu&Oka Suryadinatha Gorda, 2019). Locus of control dibagi menjadi dua yaitu internal kontrol dan eksternal kontrol. Internal kontrol dimana setiap kejadian baik atau buruk hasil dari perbuatan dirinya sendiri. Sedangkan eksternal kontrol memiliki keyakinan bahwa setiap kejadian tidak memiliki hubungan dengan tindakan yang dirinya sendiri lakukan (Lefcourt, 1989, dalam Ni Luh Putu&Oka Suryadinatha Gorda, 2019). Indikator dalam mengukur variabel *locus of control* adalah kegagalan yang dialami individu, keberhasilan individu karena kerja keras, segala yang diperoleh individu karena bukan keberuntungan, segala hasil individu dari hasil sendiri, menjadi pimpinan karena kemampuan diri (Ni Luh Putu&Oka Suryadinatha Gorda, 2019).

2.2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan dapat

disajikan dengan baik (Shinta Philadhelphia et al., 2020). Standar akuntansi sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan sebagai salah satu pengendalian karena tidak adanya standar akuntansi yang memadai maka menimbulkan implikasi negatif dan rendahnya reliabilitas informasi keuangan (Mardismo, 2009 dalam Mahardini & Miranti, 2018). Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku membuat laporan dari pemerintah pusat dan daerah sebagai pertanggungjawaban APBN dan APBD akan lebih mudah dipahami dan diukur tingkat kualitasnya.

2.2.3.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat sebelas PSAP yang dijelaskan sebagai berikut:

1. PSAP No.01 Penyajian Laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran mencakup: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran mencakup: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

4. PSAP No.03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

5. PSAP No.04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan memuat informasi yang ada pada laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

6. PSAP No.05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi diperoleh pemerintah yang memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok

produksi apabila diperoleh dari memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dari donasi atau rampasan.

7. PSAP No.06 Akuntansi Investasi

Investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengakuan investasi dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti.

8. PSAP No.07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar saat perolehan. Apabila penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

9. PSAP No.08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika: kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh biaya perolehan.

10. PSAP No.09 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau timbi. Kewajiban akan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban yang diperoleh dalam mata uang asing akan dinyatakan dalam mata ruang rupiah.

11. PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang nantinya diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kesalahan berulang adalah kesalahan yang normal dari jenis-jenis transaksi tertentu.

12. PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam standar akuntansi pemerintahan, CaLK harus mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang ripergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan.

2.2.4 Sistem Pengendalian Internal

2.2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008). Tujuan dari sistem pengendalian internal untuk mengawasi sumber data suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan pendeteksian penggelapan (fraud). Sistem

pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian yang dilaksanakan secara luas di lingkungan pemerintahan baik pusat ataupun daerah (Nilam, 2016 dalam Ridzal et al., 2022).

2.2.4.2 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut Arrens et al (2012) pengendalian internal terdiri dari lima komponen yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang memperlihatkan bagaimana sikap pimpinan dalam beretika sehingga dapat memotivasi para pegawai serta struktur organisasi yang baik dalam pemerintahan.

2. Penilaian Risiko

Instansi pemerintahan akan mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Penilaian risiko mencakup:

- a. Identifikasi risiko

Mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat tujuan, baik yang bersal dari dalam maupun luar instansi.

- b. Analisis risiko

Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif. Aktivitas pengendalian dapat dilakukan dengan cara:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sisten informasi.
- d. Pemisahan fungsi

4. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut dapat tersedia dalam berbagai bentuk serta mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan dilakukan dengan kegiatan pengelolaan rutin yang dapat dilakukan dengan pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

2.2.5 Kualitas Laporan Keuangan

2.2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan. Pengelolaan keuangan negara secara akuntabilitas dapat dilihat dari adanya laporan keuangan pemerintah, maka komponen yang disajikan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kualitas kinerja seorang pegawai bisa dilihat dari penyajian laporan keuangan yang memberikan informasi yang berkualitas kepada pemakainya.

2.2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No.71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 26 menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitasnya dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Menyediakan informasi kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c) Menyediakan informasi terkait jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman.
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.2.5.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No.71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Paragraf 28 menyebutkan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Arus Kas (LAK)
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.2.5.4 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No.71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi.

Prasayarat normatif yang diperlukan ada empat karakteristik:

- a) Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila memiliki informasi yang bisa mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mengaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi dikatakan relevan apabila:

1. Memiliki *feedback*

Adanya informasi yang relevan akan membantu pengguna mengonfirmasi ataupun mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2. Memiliki manfaat di masa yang akan datang

Pengguna dapat memprediksi masa datang lewat informasi yang diperoleh di masa lalu dan masa depan sehingga pengguna dapat merencanakan langkah yang akan dijalankan berikutnya.

3. Tepat waktu

Laporan keuangan yang disajikan dengan tepat waktu dapat berpengaruh dan memudahkan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak menghambat dalam proses selanjutnya.

4. Lengkap

Laporan keuangan harus menyajikan informasi dengan lengkap yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi diungkapkan dengan jelas dan lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaan informasi.

- b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan menyajikan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yang terdiri dari:

1. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang harus disajikan.

2. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan dipastikan kebenarannya.

3. Netralitas

Informasi ditujukan pada kepentingan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila satu entitas dengan entitas lain menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Perbandingan internal dapat dilakukan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah sesuai dengan tingkat pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemampuan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksudkan dalam laporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Locus of Control Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas tidak luput dari adanya kinerja pegawai yang baik. Tanggung jawab atas pekerjaan diwujudkan dengan keberhasilan yang telah pegawai raih. Locus of control menjadi evaluasi diri bagi individu atas pemikiran bahwa setiap orang memiliki kendali atas hidup mereka dan cenderung kurang memiliki kepercayaan diri (Sitorus *et al.*, 2019). Pemberian opini yang diberikan oleh BPK terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan dinilai dengan baik atau memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan para pegawai yang fokus pada tujuan organisasi atau pemerintah dengan menerapkan sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Andayani *et al.*, (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang juga dilakukan oleh Kurniawan *et al.*, (2017) menunjukkan hasil bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah artinya adanya *locus of control* yang baik, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

2.3.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bentuk pertanggungjawaban yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah diwujudkan dengan penyampaian laporan keuangan yang telah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Perhatian yang diberikan pada penyajian serta

pelaporan laporan keuangan pemerintahan sangat diperlukan karena informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan dipublikasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perealisasi anggaran yang sebenarnya apakah telah sesuai dengan yang mereka nikmati atau tidak. Hal itu akan menjadi tolak ukur bagi kinerja para pegawai di SKPD agar bekerja sesuai dengan tujuan pemerintah agar tidak menurunkan kredibilitas di mata rakyat ataupun di mata masyarakat.

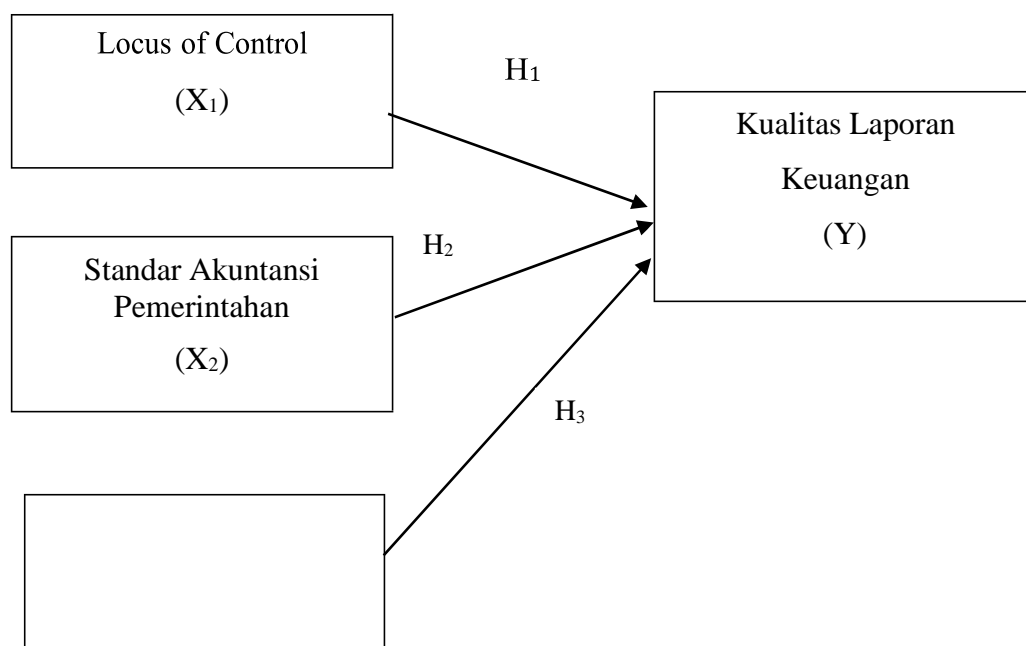
Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Philadelphia *et al* (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menjadi baik jika didukung dengan pengendalian intern yang memadai. Deteksi ketidakakuratan atau kecurangan dalam proses akuntansi dapat dilakukan dengan pengendalian intern termasuk kepatuhan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian atas kebutuhan masyarakat dapat diketahui dan dilaksanakan dengan baik sesuai target lewat bantuan sistem pengendalian intern karena motivasi yang diberikan oleh pimpinan akan menambah semangat bagi para pegawai untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kemakmuran masyarakat dapat terwujud.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridzal et al (2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawato&Wiratraja (2018) juga menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya penerapan SPI yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

H₁ : *Locus of control* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang.

H₂ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang.

H₃ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Sampang.